

IMPLEMENTASI PERMENDIKDASMEN NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN MELALUI PENGUATAN PERAN GURU WALI DI SMK NEGERI BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Hapsah¹, Gusti Muhammad Hidayatullah², M. Hasbi Salim³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

e-mail: hapsahsah87@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian kualitatif deskriptif ini menelaah bagaimana tata kelola SMK Negeri Babirik di Kabupaten Hulu Sungai Utara menerapkan regulasi tentang penciptaan lingkungan belajar yang kondusif melalui penguatan peran strategis guru wali kelas sebagai pendamping utama siswa. Dipicu oleh adanya ketimpangan dalam keaktifan pembinaan serta pengawasan perilaku peserta didik yang belum berjalan konsisten, studi ini dirancang untuk mengevaluasi dinamika implementasi kebijakan tersebut beserta seluruh faktor penentunya. Melalui wawancara mendalam, observasi terstruktur, dan telaah dokumen terhadap sembilan informan terpilih, validitas data ilmiah dijamin lewat proses pengujian kredibilitas temuan secara komprehensif. Hasil analisis mengungkapkan bahwa pelaksanaan program di lapangan sudah berjalan cukup memadai berkat adanya komitmen tinggi dari para pelaksana serta pola komunikasi yang terjalin dengan lancar. Kendati demikian, keterbatasan waktu bimbingan dan ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) spesifik bagi guru wali masih menjadi hambatan manajerial yang nyata dalam struktur birokrasi sekolah. Oleh karena itu, guna menjamin iklim sekolah yang aman dan nyaman secara berkelanjutan, institusi sangat disarankan untuk segera merumuskan panduan kerja tertulis yang jelas, menyelaraskan koordinasi dengan unit bimbingan konseling, serta mengintensifkan sistem pemantauan karakter siswa secara lebih terukur, konsisten, dan disiplin demi tercapainya tujuan mulia regulasi ini.

Kata Kunci: Guru Wali, Budaya Sekolah, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

This descriptive qualitative research examines how the governance of Babirik State Vocational High School in North Hulu Sungai Regency implements regulations on creating a conducive learning environment by strengthening the strategic role of homeroom teachers as primary mentors for students. Triggered by the inconsistent and inconsistent active guidance and supervision of student behavior, this study was designed to evaluate the dynamics of the policy's implementation and all its determinants. Through in-depth interviews, structured observations, and document reviews with nine selected informants, the validity of the scientific data was ensured through a comprehensive credibility testing process. The analysis revealed that the program's implementation in the field has been quite adequate thanks to the strong commitment of the implementers and smooth communication patterns. However, limited guidance time and the lack of specific Standard Operating Procedures

(SOP) for homeroom teachers remain significant managerial obstacles within the school's bureaucratic structure. Therefore, to ensure a sustainable safe and comfortable school climate, the institution is strongly advised to immediately formulate clear written work guidelines, align coordination with the guidance and counseling unit, and intensify the student character monitoring system in a more measurable, consistent, and disciplined manner to achieve the noble goals of this regulation.

Keywords: *Homeroom Teacher, School Culture, Policy Implementation*

PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya merupakan fondasi utama yang dirancang secara sadar untuk membangun ruang belajar yang kondusif, sehingga peserta didik dapat mengaktualisasikan segenap potensi dirinya secara seimbang, baik dari dimensi kognitif, spiritual, sosial, maupun afektif. Sekolah tidak boleh hanya dipandang sebagai ruang formal transfer pengetahuan (transfer of knowledge), melainkan harus menjadi episentrum pembentukan karakter, penyemaian nilai-nilai humanis, serta penguatan etika saling menghargai antar-individu. Dalam kondisi ideal, institusi pendidikan wajib menjamin kenyamanan dan keselamatan lahir batin bagi seluruh siswanya agar proses belajar dapat berlangsung tanpa bayang-bayang ketakutan atau intimidasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan potret yang kontras; dunia pendidikan kita masih didera isu kekerasan endemik, mulai dari perundungan verbal, pengucilan sosial, hingga tindakan represif fisik yang kerap terjadi di luar jangkauan pengawasan sekolah. Dampak buruknya pun sangat masif, merusak kestabilan emosi, menurunkan motivasi belajar, memicu trauma psikologis, hingga menghambat proses pematangan kepribadian peserta didik.

Fenomena kekerasan ini menegaskan bahwa keberhasilan sebuah lembaga pendidikan tidak boleh lagi diukur secara kaku hanya dari pencapaian akademis, melainkan dari kemampuannya menghadirkan ekosistem belajar yang ramah anak. Tanggung jawab moral dan struktural ini menuntut tindakan nyata dari seluruh elemen sekolah melalui komitmen yang terintegrasi secara sistematis. Sebagai respons konkret, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 6 Tahun 2026 mengenai Budaya Sekolah Aman dan Nyaman melalui Penguatan Peran Guru Wali. Regulasi ini memposisikan guru wali kelas bukan sekadar sebagai pelaksana fungsi administratif semata, melainkan sebagai figur strategis, pembimbing karakter, serta detektor dini yang berdiri paling dekat dengan dinamika keseharian peserta didik. Kedekatan emosional ini sangat krusial untuk membangun komunikasi dua arah yang persuasif, sehingga bibit-bibit konflik sosial di kalangan siswa dapat diredam sebelum bertransformasi menjadi tindakan kekerasan yang lebih merusak.

Namun demikian, kesenjangan yang lebar antara regulasi ideal dan praktik riil masih sering dijumpai di lapangan. Peran guru wali kelas pada kenyataannya masih terjebak dalam rutinitas birokratis kelas seperti rekapitulasi presensi, pengisian rapor, dan pendataan dokumen akademik sementara fungsi konseling emosional dan pembinaan karakter justru terabaikan. Tantangan ini semakin kompleks di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), seperti SMK Negeri Babirik di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang karakteristik pembelajarannya didominasi oleh kegiatan praktikum lapangan dan interaksi kelompok yang intensif. Berdasarkan observasi awal di sekolah tersebut, ditemukan bahwa efektivitas pendampingan wali kelas masih timpang karena keterbatasan waktu akibat beban mengajar yang tinggi. Pendampingan yang dilakukan pun masih bersifat reaktif-

situasional ketika pelanggaran telah terjadi, bukan bersifat preventif-jadwal. Akibatnya, gejala penyimpangan perilaku siswa lambat dideteksi dan rentan meluas menjadi perundungan terstruktur. Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh adanya kasus kekerasan guru terhadap siswa di SMA Negeri 2 Amuntai yang sempat viral di media sosial, yang menjadi alarm keras bagi perlunya penguatan fungsi pengawasan humanis oleh guru wali di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam perspektif teoretis, kebijakan publik pada dasarnya merupakan cerminan dari otoritas pemerintah yang memiliki kekuatan mengikat demi melayani kemaslahatan masyarakat luas. Said Zainal Abidin (2016:3) menyatakan bahwa konsep kebijakan atau *policy* erat kaitannya dengan keputusan-keputusan resmi dari pemerintah karena instansi tersebut memegang kekuasaan legal untuk mengarahkan publik. Selaras dengan hal tersebut, Aminuddin Bakry dalam Hayat (2018:17) menjelaskan kebijakan publik sebagai pilihan atau keputusan strategis yang mengarahkan pendistribusian sumber daya—baik alam, finansial, maupun manusia demi kepentingan warga negara. Pendapat lain dari Fredrich dalam Agustino (2017:166) menyebutkan bahwa kebijakan adalah rangkaian tindakan yang diajukan oleh aktor tertentu guna memecahkan hambatan di lingkungan guna mencapai target khusus. Anderson dalam Irawaty Igrisa (2022:32) membagi kebijakan ini menjadi dua dimensi, yaitu substantif (apa yang harus dicapai) dan prosedural (bagaimana cara mencapainya). Sementara itu, David Easton dalam Ida Syafriyani (2023:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai alokasi nilai-nilai kekuasaan secara otoritatif bagi seluruh masyarakat, yang mana intervensi formal pemerintah ini mengikat secara hukum demi mengatasi problematika sosial yang ada.

Proses perumusan hingga operasionalisasi suatu kebijakan harus melewati tahapan-tahapan yang sistematis. Menurut William Dunn dalam Siti Marwiyah (2022:14-16), siklus kebijakan terdiri atas penyusunan agenda (*agenda setting*) yang memilah isu publik krusial, formulasi kebijakan untuk mencari jalan keluar terbaik dari berbagai opsi, adopsi atau legitimasi kebijakan untuk memberikan kekuatan hukum, implementasi kebijakan yang menggerakkan sumber daya, hingga evaluasi kebijakan untuk menilai dampak riil dari kebijakan tersebut. Proses pembuatan kebijakan ini tidaklah sederhana dan kerap dipengaruhi oleh dinamika internal maupun eksternal. Suharno dalam Siti Marwiyah (2022:49-51) mengidentifikasi beberapa faktor krusial yang mempengaruhi kualitas kebijakan, di antaranya adalah besarnya tekanan dari pihak luar, kuatnya pengaruh kebiasaan birokrasi lama (*sunk cost*), preferensi atau karakter pribadi pembuat keputusan, desakan kelompok kepentingan, hingga pengaruh memori sejarah masa lalu yang membuat pengambil kebijakan cenderung berhati-hati atau bahkan enggan melakukan perubahan radikal.

Keberhasilan suatu kebijakan pada akhirnya sangat bergantung pada fase implementasinya di lapangan. Nurdin Usman mengartikan implementasi sebagai aktivitas terencana yang sistematis demi mewujudkan tujuan program, bukan sekadar kesibukan tanpa arah. Zainal Abidin (2019) menambahkan bahwa kelancaran implementasi sangat ditentukan oleh sinergi faktor internal (kualitas kebijakan itu sendiri) dan faktor eksternal (kondisi lingkungan sosial serta komitmen para aktor pelaksana). Berbagai model analisis implementasi digunakan untuk membedah fenomena ini; salah satunya adalah teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Leo Agustino (2016:133-136) yang menekankan enam variabel utama: kejelasan standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya (manusia, finansial, waktu), karakteristik lembaga pelaksana, disposisi atau sikap para pelaksana (penerimaan/penolakan), kualitas komunikasi antar-organisasi, serta kondisi sosiopolitis lingkungan luar. Model lain seperti Merilee S. Grindle dalam Irawaty Igrisa (2022:69-70) menitikberatkan pada isi kebijakan (*content*) dan konteks implementasi (*context*). Sementara itu, Mazmanian dan Sabatier

dalam Sahya Anggara (2018:268-269) mengklasifikasikan keberhasilan implementasi berdasarkan karakteristik masalah, struktur hukum kebijakan, dan variabel non-hukum/politik. Di sisi lain, Hogwood dan Gunn dalam Dian Suluh Kusuma Dewi (2022:134-135) menawarkan syarat "implementasi sempurna" yang menuntut ketiadaan hambatan eksternal dan validitas hubungan sebab-akibat. Charles O. Jones dalam Leo Agustino (2016:154-155) menyederhanakannya ke dalam tiga pilar operasional yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Terakhir, George C. Edward III dalam Herabudin (2016:127-131) menegaskan pentingnya empat pilar penopang: komunikasi yang efektif, kesiapan sumber daya, disposisi atau komitmen implementor, dan struktur birokrasi yang ramping melalui SOP yang jelas.

Dalam konteks pembinaan di sekolah, penguatan peran wali kelas menjadi variabel krusial untuk mentransisikan peran mereka dari sekadar pengelola administrasi menjadi pendamping karakter. Secara etimologis, Poerwadarminta dalam Prastika (2016:22) mengartikan peran sebagai cerminan perilaku dinamis yang melekat pada status atau jabatan seseorang dalam suatu tatanan sosial, yang wajib dijalankan dengan penuh dedikasi. Wali kelas memegang peran sentral dalam mengelola ekosistem kelas; Sanjaya (2006:27) menegaskan bahwa guru wali bertanggung jawab penuh menata perilaku peserta didik binaannya agar tumbuh menjadi pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur masyarakat. Petriani dan Ananda (2018:293) menambahkan bahwa pengelolaan iklim kelas oleh wali kelas harus mampu memicu gairah belajar sekaligus meminimalisasi kejenuhan siswa. Oemar Hamalik dalam Tatang (2016:101) memposisikan guru sebagai elemen paling inti dari keseluruhan proses pendidikan. Melalui peningkatan kapasitas (*capacity building*), guru wali dibekali pemahaman mendalam, kemampuan komunikasi empatik, serta keterampilan interpersonal agar dapat melakukan pendekatan persuasif-humanis. Pendekatan ini mengubah posisi wali kelas menjadi benteng preventif utama yang mampu mendeteksi gejolak sosial siswa secara dini, bukan sekadar aparat penghukum setelah konflik pecah.

Upaya menciptakan budaya sekolah yang aman dan nyaman ini pada dasarnya selaras dengan pemenuhan hak-hak dasar kemanusiaan. Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 mendefinisikan budaya aman dan nyaman ini sebagai kesatuan nilai, kebiasaan, dan etika yang dibangun bersama guna menjamin aspek spiritual, fisik, emosional, sosial-budaya, hingga keamanan digital siswa. Konsep ini bersinggungan erat dengan konsep *school climate* (iklim sekolah) oleh Hoy (2002) yang menggambarkan suasana psikologis dan pergaulan di sekolah layaknya kepribadian seseorang. Emmons dalam Scherman (2002) mengamini bahwa kualitas iklim tersebut tecermin dari kehangatan interaksi antara guru dan murid. Secara psikologis, urgensi rasa aman ini didukung penuh oleh Teori Hierarki Kebutuhan Maslow, yang menempatkan kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*) sebagai pilar fundamental yang wajib dipenuhi setelah kebutuhan fisiologis, sebelum seorang individu dapat beranjak menuju tahap aktualisasi diri. Tanpa jaminan rasa aman dari ancaman kekerasan dan intimidasi, mustahil bagi peserta didik untuk belajar secara optimal. Oleh karena itu, sinergi kebijakan, penguatan peran guru wali, serta pembentukan ekosistem sekolah yang humanis menjadi kunci utama dalam memutus rantai kekerasan demi melahirkan generasi emas yang berkarakter kuat.

METODE

Penyelidikan ilmiah ini dilaksanakan di lingkungan SMK Negeri Babirik yang berlokasi di wilayah Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Secara administratif dan geografis, institusi pendidikan ini beralamat lengkap di Jalan Babirik-Negara KM I, Desa Babirik, Kecamatan

Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi karakteristik sekolah dengan fokus kajian yang ingin diteliti secara mendalam oleh peneliti terkait dinamika lingkungan pendidikan di wilayah tersebut.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana peneliti memposisikan diri sebagai instrumen kunci (*human instrument*) untuk mengamati, menghimpun, dan membedah data secara langsung di lapangan. Melalui paradigma ini, peneliti bertindak sebagai alat pengumpul data utama guna menangkap makna yang tersirat di balik realitas yang diamati. Adapun kajian ini secara spesifik mengeksplorasi fenomena dengan tajuk “Implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Budaya Sekolah Aman Dan Nyaman Melalui Peran Guru Wali Di SMK Negeri Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

Penelitian pada hakikatnya merupakan sebuah proses berkelanjutan yang berawal dari ketertarikan personal untuk menguak suatu fenomena, yang kemudian diformulasikan ke dalam gagasan, kerangka teoretis, dan konsep ilmiah. Guna memecahkan rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini menerapkan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Model penyelidikan kualitatif ini dirancang untuk mendeskripsikan secara komprehensif fenomena yang dialami subjek penelitian melalui narasi verbal yang sistematis dan ilmiah. Orientasi utama dari metode ini adalah menyajikan potret faktual mengenai implementasi regulasi budaya sekolah aman dan nyaman lewat penguatan peran wali kelas di SMK Negeri Babirik secara terstruktur, interpretatif, dan saling berhubungan, dengan tujuan akhir menemukan pemahaman mendalam (*verstehen*) alih-alih sekadar mencari kebenaran mutlak.

Data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Merujuk pada pandangan Sugiyono (2016:225), data primer merupakan unit informasi yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama di lapangan, biasanya melalui wawancara mendalam maupun observasi langsung terhadap subjek. Hal ini diperkuat oleh pendapat Hasan (2002:82) yang menyatakan bahwa data primer merupakan data orisinal yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian, sehingga sifatnya masih murni, aktual, dan belum tersentuh modifikasi pihak eksternal. Sementara itu, data sekunder diperoleh lewat penelaahan dokumen tertulis, literatur, buku referensi, serta arsip yang relevan. Sebagaimana dijelaskan Siyoto (2015:67), teknik dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis materi tertulis, visual, maupun digital guna menghasilkan sintesis kajian yang utuh dan komparatif. Adapun penentuan informan sebagai sumber data didasarkan pada teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan sampel dengan kriteria logis tertentu seperti figur yang dinilai paling menguasai domain informasi yang diteliti yang dalam konteks ini meliputi para pemangku kepentingan di sekolah.

Desain operasional berfungsi sebagai panduan taktis sekaligus instrumen bantu bagi peneliti agar proses pengumpulan data di lapangan berjalan lebih terarah, presisi, dan sistematis. Guna membedah efektivitas penerapan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 mengenai penciptaan budaya sekolah yang kondusif di SMK Negeri Babirik, penelitian ini mengadopsi model implementasi kebijakan George Edwards III dalam Herabudin (2016:127). Berdasarkan teori tersebut, keberhasilan sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh empat variabel krusial yang saling berkelindan, yaitu pola komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi atau sikap para pelaksana, serta struktur birokrasi yang menaunginya. Keempat indikator inilah yang nantinya ditransformasikan ke dalam matriks instrumen penelitian guna mempermudah proses penggalian data di lapangan.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif wajib dilakukan pada situasi yang alamiah (*natural setting*) dengan mengandalkan tiga teknik utama, yaitu observasi partisipatif, wawancara

mendalam, dan telaah dokumen. Pertama, observasi diartikan oleh Bungin dalam Haryoko (2020:152) sebagai aktivitas harian manusia yang mengoptimalkan panca indra penglihatan didukung indra lainnya untuk mengidentifikasi fenomena secara langsung di lapangan. Kedua, wawancara dipahami oleh Moleong dalam Haryoko (2020:165) sebagai bentuk komunikasi verbal dua arah dengan tujuan spesifik, melibatkan interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan informan (*interviewee*) guna menggali informasi mendalam mengenai topik tertentu. Ketiga, teknik dokumentasi menurut Ridjal dalam Haryoko (2020:177) merupakan upaya merekam jejak peristiwa masa lalu yang berkaitan erat dengan konteks sosial subjek, baik berupa berkas tertulis, foto, maupun dokumen digital resmi yang kemudian dianalisis secara kritis.

Proses analisis data kualitatif dalam penelitian ini mengikuti model interaktif Miles dan Huberman sebagaimana diuraikan oleh Sugiyono (2023:132-142), yang terdiri atas tiga tahapan simultan. Tahap pertama adalah kondensasi data (*data condensation*), yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, serta mengabstraksikan data mentah yang bersumber dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumen agar informasi yang dihasilkan menjadi lebih tajam (Sugiyono, 2023:142). Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*), di mana jika dalam riset kuantitatif menggunakan diagram atau tabel numerik, maka dalam riset kualitatif data disajikan melalui teks naratif yang terorganisasi agar pola hubungannya mudah dipahami (Sugiyono, 2023:137). Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*), di mana peneliti merumuskan temuan baru yang kredibel berupa deskripsi objek yang sebelumnya samar menjadi jelas setelah didukung oleh bukti-bukti empiris yang solid di lapangan (Sugiyono, 2023:142).

Untuk menjamin derajat kepercayaan (*trustworthiness*) terhadap data kualitatif yang diperoleh, peneliti menerapkan enam teknik uji kredibilitas merujuk pada metodologi Sugiyono (2023:186-193). Langkah tersebut meliputi: (1) *Perpanjangan pengamatan*, yakni memperpanjang durasi kehadiran peneliti di sekolah guna membangun hubungan yang erat dengan subjek sekaligus menguji konsistensi data yang sempat dicurigai di awal; (2) *Meningkatkan ketekunan*, yaitu melakukan pengamatan secara cermat, mendalam, dan berkesinambungan serta memperkaya wawasan teoretis lewat buku referensi untuk meminimalisasi kekeliruan interpretasi; (3) *Triangulasi*, yang mencakup triangulasi sumber (mengecek data ke berbagai pihak), triangulasi teknik (menguji kesamaan data dengan metode wawancara, observasi, dan dokumen yang berbeda), serta triangulasi waktu guna memastikan stabilitas informasi; (4) *Analisis kasus negatif*, yaitu melacak data yang kontradiktif atau menyimpang dari temuan sementara guna menyempurnakan kesimpulan akhir; (5) *Penggunaan bahan referensi*, berupa penyediaan bukti otentik pendukung seperti rekaman audio wawancara, foto dokumentasi kegiatan, dan berkas formal sekolah; serta (6) *Melaksanakan member check*, yaitu mengonfirmasikan kembali draf data hasil temuan kepada para informan selaku pemberi data guna menyepakati kesesuaian interpretasi peneliti dengan realitas yang sesungguhnya.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Melalui Penguatan Peran Guru Wali Di SMK Negeri Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Komunikasi

a. Sosialisasi Kebijakan

Sosialisasi kebijakan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di SMK Negeri Babirik tergolong cukup optimal meskipun

belum dilaksanakan sosialisasi atau rapat khusus secara formal. Penyampaian informasi mengenai kebijakan ini berlangsung melalui arahan langsung dari Kepala Sekolah kepada para Guru Wali. Arahan tersebut ditindaklanjuti guru melalui bimbingan dan pendampingan kepada siswi di kelas, sebagaimana terkonfirmasi melalui hasil observasi di lapangan.

Pelaksanaan sosialisasi lisan ini belum sepenuhnya sesuai dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III dalam Herabudin (2016: 27), yang menekankan pentingnya transmisi komunikasi yang jelas, konsisten, dan menyeluruh. Walaupun arahan langsung dari Kepala Sekolah mampu memberikan pemahaman tugas kepada pelaksana untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, pelaksanaan sosialisasi formal yang lebih terstruktur tetap diperlukan guna mengoptimalkan penyampaian informasi kebijakan kepada seluruh pihak yang terlibat.

b. Kejelasan

Implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di SMK Negeri Babirik pada sub-indikator kejelasan komunikasi telah berjalan optimal. Arahan dari Kepala Sekolah terkait tugas pembinaan siswa dapat dipahami secara jelas oleh para Guru Wali. Petunjuk tersebut kemudian diteruskan kepada para siswi menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami, sebagaimana terkonfirmasi melalui hasil observasi di kelas.

Penyampaian arahan yang efektif ini selaras dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III dalam Herabudin (2016: 27), yang menegaskan pentingnya kejelasan komunikasi agar para pelaksana tidak mengalami kebingungan dalam menjalankan tugasnya. Keberhasilan Kepala Sekolah dan Guru Wali dalam menyampaikan informasi secara gamblang memastikan seluruh elemen pelaksana maupun sasaran kebijakan memahami peran masing-masing, sehingga dapat mewujudkan budaya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman secara berkesinambungan.

c. Konsistensi

Implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di SMK Negeri Babirik pada sub-indikator konsistensi komunikasi telah berjalan optimal. Kepala Sekolah secara konsisten memberikan arahan yang tetap dan tidak berubah-ubah kepada para Guru Wali. Arahan tersebut dipatuhi dan secara berkelanjutan dilaksanakan guru dalam membimbing siswi sebagaimana diperkuat oleh hasil observasi di lapangan.

Konsistensi penyampaian pesan ini selaras dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III dalam Herabudin (2016: 27), yang menegaskan bahwa komunikasi harus disampaikan secara ajek dan seragam agar tujuan kebijakan tercapai secara efektif. Keselarasan antara perintah Kepala Sekolah dan tindakan Guru Wali membuktikan bahwa arahan yang konsisten mampu menjadi pedoman kuat dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman secara berkesinambungan.

2. Sumber Daya

a. Pelaksana Kebijakan

Implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 pada sub-indikator pelaksana kebijakan di SMK Negeri Babirik tergolong cukup optimal. Kepala Sekolah, para Guru Wali, serta Guru BK telah memahami tugas pembinaan siswa. Meski demikian,

pendampingan kepada siswi belum terlaksana secara rutin dan merata akibat beban tugas mengajar serta tanggung jawab tambahan guru wali, sebagaimana diperkuat oleh hasil observasi.

Kondisi tersebut selaras dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III dalam Herabudin (2016: 27), yang mengidentifikasi keberadaan dan kesiapan pelaksana kebijakan sebagai komponen sumber daya yang krusial. Meskipun kemampuan serta pemahaman tugas para Guru Wali sudah sangat memadai, terbatasnya alokasi waktu akibat rangkap tugas menyebabkan proses pendampingan siswa baru berjalan insidental sesuai kebutuhan, sehingga implementasi kebijakan pada dimensi ini dikategorikan cukup optimal.

b. Sarana Pendukung

Implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 pada sub-indikator sarana pendukung di SMK Negeri Babirik telah berjalan optimal. Kepala, para Guru Wali, serta Guru BK secara efektif memanfaatkan fasilitas ruang BK, meja dan kursi konseling, serta buku BK. Sarana tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, pendampingan, dan penanganan masalah siswi, sebagaimana terbukti dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Ketersediaan fasilitas pendukung ini selaras dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Herabudin (2016: 27), yang menegaskan bahwa sarana dan prasarana merupakan variabel sumber daya penting untuk menunjang keberhasilan kebijakan. Kelengkapan fasilitas fisik di sekolah secara nyata membantu para pelaksana dalam menjalankan kegiatan bimbingan dan pendampingan siswa secara maksimal guna menciptakan budaya sekolah yang aman dan nyaman.

3. Disposisi

a. Sikap Pelaksana

Implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di SMK Negeri Babirik pada indikator sikap pelaksana (disposisi) telah berjalan secara optimal. Kepala Sekolah dan para Guru Wali menunjukkan kepedulian, kesabaran, keterbukaan, serta rasa tanggung jawab yang tinggi dalam membimbing siswa. Sikap positif tersebut dirasakan langsung oleh para siswi dan diperkuat oleh hasil observasi lapangan.

Kondisi ini selaras dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Herabudin (2016: 27), yang mengindikasikan disposisi atau sikap pelaksana sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan kebijakan. Kemauan kuat, komitmen, dan kesungguhan dari para Guru Wali dalam mengarahkan serta membimbing peserta didik terbukti mampu menunjang pencapaian tujuan regulasi dalam mewujudkan lingkungan belajar sekolah yang aman, tertib, dan nyaman secara optimal.

b. Komitmen Pelaksana

Implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di SMK Negeri Babirik pada sub-indikator komitmen pelaksana tergolong cukup optimal. Kepala Sekolah dan para Guru Wali menunjukkan komitmen dan kesungguhan dalam membimbing serta mendampingi siswa. Meskipun demikian, pendampingan kepada siswi dapat dilakukan secara rutin akibat adanya beban tugas

mengajar dan tugas sekolah lainnya, sebagaimana terkonfirmasi dari hasil wawancara dan observasi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Herabudin (2016: 27), yang menyatakan bahwa disposisi atau komitmen pelaksana merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Komitmen yang baik mendorong pelaksana menjalankan tugas sesuai tujuan regulasi, namun keterbatasan waktu akibat rangkap tugas menyebabkan proses pendampingan siswa belum sepenuhnya optimal sehingga pencapaian kinerja dikategorikan cukup optimal.

4. Struktur Birokrasi

a. Mekanisme Koordinasi

Implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di SMK Negeri Babirik pada sub-indikator mekanisme koordinasi (struktur birokrasi) telah berjalan secara optimal. Kepala Sekolah dan para Guru Wali menerapkan alur penanganan bertahap, di mana Guru Wali memberikan pembinaan awal. Apabila kendala belum teratasi, penanganan dikoordinasikan kepada Guru BK, sebagaimana terkonfirmasi oleh siswi dan hasil observasi.

Alur kerja sama ini selaras dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Herabudin (2016: 27), yang menempatkan struktur birokrasi dan mekanisme koordinasi sebagai faktor krusial kelancaran pelaksanaan kebijakan. Koordinasi yang terstruktur dan responsif antara Guru Wali, Guru BK, serta Kepala Sekolah memastikan setiap permasalahan siswa tertangani secara tepat sesuai kebutuhan, sehingga mendukung efektivitas terwujudnya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

b. SOP

Implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di SMK Negeri Babirik pada sub-indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) tergolong cukup optimal. Kepala Sekolah serta para Guru Wali mengonfirmasi bahwa belum terdapat SOP khusus yang mengatur tugas guru wali secara tertulis. Pelaksanaan bimbingan dan pendampingan siswa selama ini tetap berjalan berpatokan pada aturan umum sekolah serta arahan langsung dari Kepala Sekolah, sebagaimana diperkuat oleh hasil observasi.

Kondisi ini selaras dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Herabudin (2016: 27), yang menempatkan SOP sebagai unsur struktur birokrasi penting untuk menertibkan pelaksanaan pekerjaan pelaksana kebijakan. Meskipun pembinaan siswa tetap terlaksana melalui arahan dan pedoman umum sekolah, ketiadaan SOP khusus menyebabkan tata kerja belum memiliki standar tertulis yang baku, sehingga capaian pada sub-indikator ini dinilai cukup optimal.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman melalui Penguatan Peran Guru Wali Di SMK Negeri Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor Pendukung:

a. Dukungan dan Arahan Kepala Sekolah

Implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di SMK Negeri Babirik pada aspek dukungan dan arahan Kepala

Sekolah telah berjalan optimal. Kepala Sekolah secara konsisten memberikan arahan berkelanjutan kepada para Guru Wali untuk menyamakan pemahaman dalam mendampingi dan memantau siswa, meskipun belum tersedia SOP khusus. Keberlanjutan arahan tersebut memicu pelaksanaan tugas secara efektif, sebagaimana terkonfirmasi melalui hasil wawancara dan observasi. Temuan ini selaras dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III dalam Herabudin (2016: 27), di mana komunikasi yang jelas dan berkesinambungan dari pimpinan menjadi faktor pendukung utama pencapaian tujuan kebijakan.

b. **Komitmen dan Sikap Peduli Guru Wali**

Implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di SMK Negeri Babirik pada aspek komitmen dan sikap peduli Guru Wali telah terlaksana secara optimal. Guru Wali secara konsisten menunjukkan kesungguhan meluangkan waktu untuk membimbing, mendampingi, serta memperhatikan masalah siswa di tengah kepadatan beban mengajar, sebagaimana dirasakan langsung oleh siswi dan dibuktikan lewat hasil observasi. Capaian positif ini selaras dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III dalam Herabudin (2016: 27), yang menegaskan bahwa disposisi pelaksana berupa komitmen, rasa tanggung jawab, serta kesediaan bertindak merupakan faktor penting pendukung keberhasilan penerapan suatu kebijakan.

c. **Ketersediaan Sarana Pendukung**

Implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di SMK Negeri Babirik pada aspek ketersediaan sarana pendukung telah berjalan dengan baik. Ketersediaan fasilitas seperti ruang BK beserta kelengkapannya sangat membantu Guru Wali dalam memberikan pembinaan serta penanganan permasalahan siswa secara lebih privat, sebagaimana terbukti melalui hasil wawancara dan observasi. Keberadaan sarana pendukung ini selaras dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Herabudin (2016: 27), yang menyatakan bahwa ketersediaan sumber daya berupa fasilitas atau sarana merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

d. **Koordinasi yang Baik antara Guru Wali dan Guru BK**

Implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di SMK Negeri Babirik pada aspek mekanisme koordinasi antara Guru Wali dan Guru BK telah terlaksana secara optimal. Guru Wali secara aktif membangun komunikasi dan kerja sama dengan Guru BK untuk segera menindaklanjuti permasalahan siswa yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, sebagaimana terbukti melalui hasil wawancara dan observasi. Alur kerja sama ini selaras dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Herabudin (2016: 27), yang mengidentifikasi mekanisme koordinasi dalam struktur birokrasi sebagai faktor pendukung krusial untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan hingga mencapai tujuan secara efektif.

2. **Faktor Penghambat:**

a. **Belum adanya SOP khusus Guru Wali**

Implementasi peran Guru Wali di SMK Negeri Babirik dalam mendukung Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tergolong cukup optimal, meski belum memiliki Standard Operating Procedures (SOP) tertulis yang khusus. Hasil wawancara dan

observasi menunjukkan bahwa tugas pembinaan, pendampingan, dan pemantauan siswa masih mengacu pada aturan umum sekolah, arahan rapat, serta koordinasi dengan Guru BK. Akibatnya, pelaksanaan tugas di lapangan masih fleksibel dan tingkat konsistensinya bervariasi antar-Guru Wali. Hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan teori George C. Edward III yang menekankan pentingnya SOP sebagai pedoman tertulis agar mekanisme kerja dapat berjalan secara terstruktur, efektif, dan konsisten.

b. Keterbatasan Waktu Guru Wali karena Beban Tugas Mengajar

Implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di SMK Negeri Babirik terkait keterbatasan waktu Guru Wali tergolong cukup optimal. Guru Wali tetap berupaya melaksanakan pembinaan, meski pendampingan secara rutin terkendala beban tugas mengajar dan pengelolaan laboratorium komputer. Hasil observasi mengonfirmasi pendampingan siswa baru terlaksana saat terjadi permasalahan. Kondisi ini belum sepenuhnya sesuai dengan teori sumber daya George C. Edwards III dalam Herabudin (2016: 27), sebab keterbatasan alokasi waktu pelaksana menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman melalui penguatan peran Guru Wali di SMK Negeri Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, secara keseluruhan telah berjalan cukup optimal ditinjau dari empat indikator implementasi kebijakan model George C. Edward III. Pertama, pada indikator komunikasi, penyampaian informasi dan penyamaan pemahaman mengenai regulasi telah terlaksana dengan baik melalui arahan langsung yang diberikan secara konsisten dan berkelanjutan oleh Kepala Sekolah kepada para Guru Wali, meskipun proses penyampaian tersebut belum didukung oleh pelaksanaan agenda sosialisasi yang diselenggarakan secara khusus. Kedua, pada indikator sumber daya, para Guru Wali telah memahami serta menjalankan tugas pokok pembinaan yang didukung penuh oleh ketersediaan sarana penunjang yang memadai seperti ruang Bimbingan Konseling (BK), meja dan kursi konseling, serta buku catatan penanganan siswa; walaupun demikian, efektivitas pendampingan siswa secara rutin masih mengalami kendala berupa keterbatasan alokasi waktu akibat tingginya beban tugas mengajar di kelas serta tugas sekolah lainnya. Ketiga, pada indikator disposisi, seluruh Guru Wali menunjukkan komitmen yang kuat, kepedulian yang tinggi, kesabaran, keterbukaan, serta sikap responsif dan penuh rasa tanggung jawab dalam membimbing, mengarahkan, dan memperhatikan perkembangan para peserta didik demi mewujudkan lingkungan belajar yang tertib, aman, dan nyaman. Keempat, pada indikator struktur birokrasi, alur kerja sama dan mekanisme koordinasi berejang antara Guru Wali dengan Guru BK maupun Kepala Sekolah dalam menyelesaikan permasalahan siswa telah berjalan dengan optimal, meskipun pelaksanaan fungsi operasional tersebut belum ditunjang oleh panduan tertulis berupa Standard Operating Procedure (SOP) khusus bagi Guru Wali. Keberhasilan pelaksanaan regulasi di lingkungan sekolah ini dipengaruhi secara signifikan oleh dinamika faktor pendukung dan faktor penghambat di lapangan. Faktor-faktor pendukung mencakup kontinuitas dukungan dan arahan Kepala Sekolah, komitmen serta sikap peduli Guru Wali, kelengkapan sarana fisik di ruang BK, dan efektivitas koordinasi lintas peran antara Guru Wali dan Guru BK. Sementara itu, faktor-faktor penghambat

meliputi ketiadaan SOP khusus tertulis sebagai standar kerja baku, munculnya variasi tingkat pemahaman serta ketidaksamaan konsistensi pelaksanaan tugas antar-Guru Wali, dan terbatasnya kesempatan waktu Guru Wali untuk melakukan pendampingan siswa secara merata dan rutin akibat terbagi dengan kewajiban utama mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 *tentang Penguatan Peran Guru Wali*.

Abidin, Said Zainal. (2016). *Kebijakan publik*. Jakarta: Salemba Humanika.

Abidin, Zainal. (2019). *Implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Pustaka Setia.

Agustino, Leo. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

Agustino, Leo. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.

Anggara, Sahya. (2018). *Kebijakan publik*. Bandung: Pustaka Setia.

Dunn, William N. (2013). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hayat. (2018). *Kebijakan publik: Evaluasi, reformasi, dan formulasi*. Malang: Intrans Publishing.

Herabudin. (2016). *Studi kebijakan pemerintah: Dari filosofi ke implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.

Igirisa, Irawaty. (2022). *Implementasi kebijakan publik*. Yogyakarta: Deepublish.

Marwiyah, Siti. (2022). *Analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Samudra Biru.

Usman, Nurdin. (2014). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Panduan Sekolah Aman, Nyaman, dan Menggembirakan*. Jakarta: Kemendikbudristek.